



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2023

BBRP2BKP

**BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LAPORAN KINERJA (LKj) BBRP2BKP TRIWULAN III TAHUN 2023



**BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN
BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

Langgeng Nurdiansah

Plt. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Ketua Kelompok Kerja

Cica Sugiarti

Anggota

Zilfia Nora
Indrihastuti Sulistianingtiyas
Delima Agustina
Muthia Khelfa Pramesti
Vandra Anggriawan
Syamsul Ariffin

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) Triwulan III Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

LKj BBRP2BKP Triwulan III Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BBRP2BKP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selain itu juga untuk sarana melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja BBRP2BKP.

LKj ini menguraikan rencana kerja BBRP2BKP beserta analisis capaiannya selama Triwulan III Tahun 2023. Secara umum target kinerja BBRP2BKP yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023 telah tercapai, dan hal ini akan digunakan sebagai bahan untuk merumuskan perencanaan kinerja serta langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukannya untuk penyempurnaan laporan ini.

Kami berharap LKj Triwulan III ini bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai BBRP2BKP dalam meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Jakarta, 17 Oktober 2023
Pit. Kepala BBRP2BKP



Langgeng Nurdiansah

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
I. PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan	6
1.3 Tugas dan Fungsi	7
1.4 Keragaan SDM	9
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	11
II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Sasaran Kegiatan	15
2.3 Potensi dan Permasalahan	16
2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	17
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	18
2.6 Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	19
III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Prestasi Indikator Kinerja (IK) Triwulan III Tahun 20223.....	22
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	23
3.3 Akuntabilitas Keuangan BBRP2BKP Triwulan III Tahun 2023.....	51
3.4 Efisiensi Anggaran dan/atau Alokasi Sumber Daya BBRP2BKP Tahun 2023	54
IV. PENUTUP	58
4.1 Capaian Indikator Kinerja.....	58
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	59
LAMPIRAN	60

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	8
GAMBAR 2. KERAGAAN PEGAWAI BBRP2BKP TRIWULAN III TAHUN 2023.....	9
GAMBAR 3. DASHBOARD KINERJAKU BBRP2KP TRIWULAN III TAHUN 2023.....	23
GAMBAR 4. RAPAT PEMBAHASAN USULAN PERUBAHAN PP No.85 TAHUN 2021 TENTANG JENIS DAN TARIF PNBP YANG BERLAKU PADA KKP	29
GAMBAR 5. RAPAT KOORDINASI DAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP BRSDM YANG DISELENGGARAKAN OLEH SEKRETARIAT BRSDM.....	30
GAMBAR 6. RAPAT KOORDINASI DAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP BRSDM YANG DISELENGGARAKAN OLEH SEKRETARIAT BRSDM.....	30
GAMBAR 7. RAPAT KOORDINASI DAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP BRSDM YANG DISELENGGARAKAN OLEH SEKRETARIAT BRSDM.....	31
GAMBAR 8. RAPAT PEMBAHASAN RENCANA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DENGAN PT. MUTU INTERNASIONAL.....	31
GAMBAR 9. RAPAT KOORDINASI TERKAIT VERIFIKASI DATA DUKUNG CAPAIAN SKP PEGAWAI BBRP2BKP	35
GAMBAR 10. PENILAIAN MANDIRI SAKIP LINGKUP BRSDMKP TAHUN 2023.....	37
GAMBAR 11. KEGIATAN ASSESSMENT AWAL IKU REKONSILIASI KINERJA PADA BBRP2BKP 39	
GAMBAR 12. MENERIMA KUNJUNGAN KERJA TIM SEKRETARIAT BPPSDM KP DALAM RANGKA SOSIALISASI IKU MANAJEMEN PENGETAHUAN KKP	41
GAMBAR 13. REKONSILIASI APLIKASI PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI LINGKUP BRSDM	48
GAMBAR 15. LAPORAN BULANAN BBRP2BKP BULAN JANUARI-SEPTEMBER TAHUN 2023	50
GAMBAR 15. NILAI SMART DJA TRIWULAN III 2023	55
GAMBAR 16. DASHBOARD KINERJAKU BBRP2KP TRIWULAN III TAHUN 2022.....	58

DAFTAR TABEL

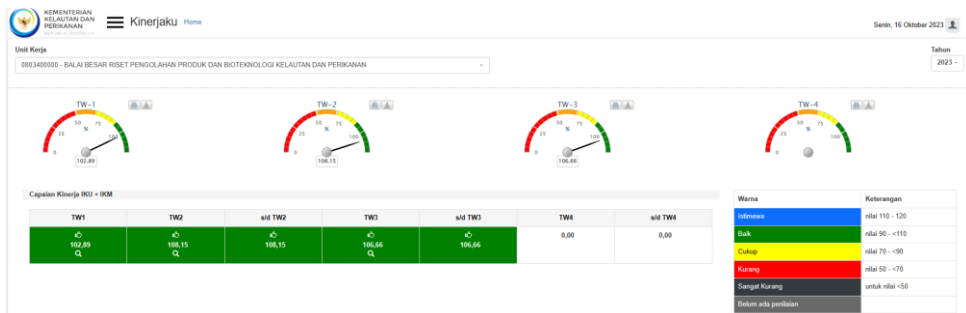
TABEL 1. JUMLAH PEGAWAI YANG BERSTATUS PNS BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM.....	10
TABEL 2. PERJANJIAN KINERJA BBRP2BKP TAHUN 2023	18
TABEL 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IK) TRIWULAN III TAHUN 2023	24
TABEL 4. PERBANDINGAN NILAI IKU REKONSILIASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN NILAI ASSESMENT AWAL IKU REKONSILIASI KINERJA TAHUN 2023	40
TABEL 5. PERUBAHAN PENILAIAN KOMPONEN MANAJEMEN PENGETAHUAN	41
TABEL 6. CAPAIAN IKM 7	42
TABEL 7. CAPAIAN IKM 8.....	44
TABEL 8. CAPAIAN IKM 11	49
TABEL 9. REALISASI ANGGARAN BBRP2BKP TRIWULAN III TAHUN 2023.....	51
TABEL 10. REALISASI ANGGARAN PER-INDIKATOR KINERJA BBRP2BKP	52
TABEL 11. PERHITUNGAN EFISIENSI ANGGARAN BBRP2BKP 2023	55

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan gambaran capaian kinerja BBRP2BKP Triwulan III Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2023, BBRP2BKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Kegiatan dan 11 Indikator Kinerja (IK). Pengukuran capaian kinerja BBRP2BKP Triwulan III Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan capaian kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) triwulan III tahun 2023 mendapatkan Skor Kinerja sebesar **106,66 (BAIK)** sebagaimana dashboard Kinerjaku berikut:



Dashboard Kinerjaku Level 2 BBRP2BKP

Hingga triwulan III tahun 2023, dari 11 IK yang menjadi target BBRP2BKP hanya 3 IK yang memiliki capaian, sedangkan untuk IK lainnya akan diukur pada triwulan berikutnya. Rincian target dan capaian IK triwulan III tahun 2023 tersebut adalah:

1. IK 7 "Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRP2BKP (%)", dengan target 92 dan tercapai 133,33 dengan persentase capaian sebesar 120%.
2. IK 8 "Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BBRP2BKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)", dengan target 75 dan tercapai 75 dengan persentase capaian sebesar 100%.
3. IK 11 "Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)", dengan target 75 dan tercapai 75 dengan presentase capaian sebesar 100%.

Matriks capaian Indikator Kinerja BBRP2BKP Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target/Capaian				Ket
				Target 2023	Target Triwulan III 2023	Capaian Triwulan III 2023	%	
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup BBRP2BKP (unit)	1	-	-	-	
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2	Nilai PNBP BBRP2BKP (Rupiah Miliar)	0,08	-	-	-	
		3	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BBRP2BKP dibandingkan realisasi Anggaran BBRP2BKP TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-	
		4	Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)	75	-	-	-	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Capaian				Ket
			Target 2023	Target Triwulan III 2023	Capaian Triwulan III 2023	%	
		5 Nilai PM SAKIP Lingkup BBRP2BKP (Nilai)	80,5	-	-	-	
		6 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BBRP2BKP (Nilai)	92	-	-	-	
		7 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRP2BKP (%)	92	92	133,33	120	
		8 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BBRP2BKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	75	100	
		9 Nilai IKPA BBRP2BKP (Nilai)	89	-	-	-	
		10 Nilai Kinerja Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	82	-	-	-	
		11 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)	100	75	75	100	

Warna

Keterangan

	Istimewa (nilai 110 - 120)
	Baik (nilai 90 - <110)
	Cukup (nilai 70 - < 90)
	Kurang (nilai 50 - < 70)
	Sangat Kurang (nilai <50)
	Belum ada penilaian

Secara umum capaian kinerja BBRP2BKP pada Triwulan III tahun 2023 pada kategori **“Baik”**, dan upaya yang direkomendasikan untuk meningkatkan capaian kinerja BBRP2BKP pada triwulan berikutnya yaitu Indikator Kinerja yang memiliki target tahunan perlu dilakukan pengawalan dengan baik, guna memastikan bahwa capaian Indikator Kinerja dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Realisasi anggaran BBRP2BKP hingga akhir Triwulan III tahun 2023 adalah sebesar Rp12.411.851.537 (66,20%). Realisasi ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp5.123.570.923 (69,24%) dan belanja barang sebesar Rp7.288.280.614 (65,66%). Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan layanan dukungan manajemen internal (layanan perkantoran, layanan hubungan masyarakat, layanan umum, layanan data dan informasi, layanan manajemen SDM, layanan perencanaan dan penganggaran serta layanan pemantauan dan evaluasi).

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, dan memberikan dampak serta manfaat dari hasil yang diperoleh.

Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) Triwulan III Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan atas pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran yang menguraikan dan memuat capaian kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Acuan dalam penyusunan LKj BBRP2BKP Triwulan III Tahun 2023 antara lain, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan acuan tersebut, BBRP2BKP berkewajiban untuk mempertanggungjawaban tugas dan fungsinya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah dan penyelenggara negara di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2023 BBRP2BKP telah menetapkan rencana kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai, serta menyusun LKj BBRP2BKP Triwulan III Tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban BBRP2BKP.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan LKj BBRP2BKP Triwulan III Tahun 2023 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja BBRP2BKP yang telah dan seharusnya dicapai pada Triwulan III Tahun 2023;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BBRP2BKP untuk meningkatkan kinerjanya pada triwulan berikutnya.

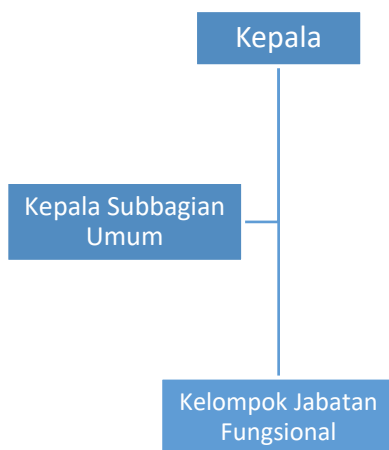
Tugas dan Fungsi

BBRP2BKP mempunyai tugas melaksanakan riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBRP2BKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan dibidang keamanan pangan, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis bioteknologi, peningkatan kualitas dan nilai tambah, serta sistem, model, dan kebijakan teknis industri pengolahan perikanan;
- c. Pengembangan teknologi pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan;
- d. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset;
- e. Pengelolaan prasarana dan sarana; dan

f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi BBRP2BKP terdiri atas Kepala, Subbagian Umum, dan Jabatan Fungsional. Struktur organisasi disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Tugas dari masing-masing Subbagian serta Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana riset.

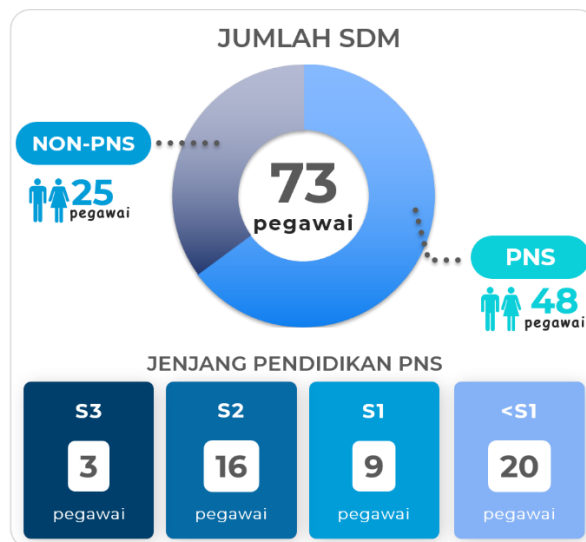
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Keragaan SDM

Dukungan sumber daya manusia pada program/kegiatan Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan berdasarkan status kepegawaian disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Keragaan pegawai BBRP2BKP Triwulan III Tahun 2023

Jumlah pegawai BBRP2BKP sampai dengan Triwulan III tahun 2023 yaitu sebanyak 73 pegawai terdiri dari 48 pegawai berstatus PNS (66%) dan 25 pegawai berstatus Non PNS (34%).

Jenjang pendidikan pegawai yang berstatus PNS yaitu S3 sebanyak 3 orang (4%), S2 sebanyak 16 orang (38%), S1 sebanyak 9 orang (18%), serta berpendidikan <S1 sebanyak 20 orang (43%). Hingga saat ini, pegawai BBRP2BKP memangku jabatan yaitu Instruktur, Pranata Keuangan APBN, Perencana, Pranata Humas, Pustakawan, Analis Pengelola Keuangan APBN, Arsiparis, Analis

Kepegawaian serta Fungsional Umum. Sebagian besar pegawai BBRP2BKP memangku jabatan fungsional Umum (38%) dan memangku jabatan fungsional Instruktur (35%).

Tabel 1. Jumlah pegawai yang berstatus PNS berdasarkan jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum

No	Jabatan	Jumlah
1	Instruktur Madya	3
2	Instruktur Muda	9
3	Instruktur Pertama	2
4	Pustakawan Ahli Muda	1
5	Arsiparis Ahli Pertama	1
6	Pranata Humas Ahli Madya	1
7	Perencana Ahli Madya	1
8	Perencana Ahli Muda	1
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
11	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
12	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
13	Pranata Keuangan APBN Terampil	2
14	Analisis Kepegawaian Muda/Ahli Muda	1
15	Jabatan Fungsional Umum	21
Total		48

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait dengan SDM adalah IP ASN. Pengukuran IP ASN dilakukan pada website <http://ropeg.kkp.go.id/>. Capaian IKU IP ASN BBRP2BKP pada bulan Juli 2023 ini adalah sebesar 91,48 dengan keterangan “Sangat Tinggi”. Nilai ini masih dapat ditingkatkan lagi meskipun target tahunan Indikator Kinerja ini sudah tercapai (75). Upaya untuk meningkatkan indeks IP ASN antara lain dengan cara peningkatan kualifikasi pendidikan, kompetensi pegawai, kinerja dan disiplin pegawai.

Sistematika Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja BBRP2BKP Triwulan III Tahun 2023, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2023 terhadap rencana kinerja Triwulan III tahun 2023 serta membandingkan capaiannya dengan Triwulan III tahun 2022. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja (LKj) tahunan adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Berisi ringkasan dari laporan, meliputi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

2. Bab I – Pendahuluan

Berisi gambaran umum tentang BBRP2BKP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BBRP2BKP

3. Bab II – Perencanaan Kinerja

Berisi uraian singkat tentang Rencana Strategis BBRP2BKP 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja BBRP2BKP Tahun 2022 serta Pengukuran Kinerja

4. Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berisi capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu (dua tahun terakhir);
 - c. Membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - d. Membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional jika ada;
 - e. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - f. Menganalisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; dan
 - g. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja BBRP2BKP serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. Lampiran

Perjanjian Kinerja BBRP2BKP Tahun 2023

Surat Tugas Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BBRP2BKP Tahun 2023

II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Sebagai acuan dalam menyusun visi BBRP2BKP adalah Visi KKP, yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

BBRP2BKP mempunyai tugas melaksanakan riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab pada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Namun demikian, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) berubah menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP).

BPPSDMKP mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan visi KKP dan BPPSDMKP, maka BBRP2BKP menetapkan visi yaitu **“Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Untuk Mencapai Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong.”**, dan misi yaitu:

1. Pengembangan inovasi teknologi melalui riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan
2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di BBRP2BKP

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada BBRP2BKP, maka guna pencapaian visi dan misi BPPSDMKP dan KKP, disusun tujuan sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas lembaga, riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan yang meliputi penguatan tata kelola organisasi, SDM, sarana-prasarana, serta akses informasi.
2. Memperkuat kapasitas iptek melalui riset pengolahan produk dan bioteknologi KP untuk peningkatan daya saing

- sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan kemampuan penyebarluasan/diseminasi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi KP yang kemanfaatannya dirasakan oleh pengguna.
 4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset pengolahan produk dan bioteknologi KP sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran Kegiatan

Peta strategis merupakan suatu *dashboard* yang memetakan Sasaran Kegiatan (SK) ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis BBRP2BKP. Peta strategis memudahkan BBRP2BKP untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam rangka pemahaman terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan BBRP2BKP.

Dalam rangka mendukung Program KKP dan BPPSDMKP yaitu “Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan” serta “Program Dukungan Manajemen”, BBRP2BKP menetapkan Perjanjian Kinerja yang terdiri atas 2 Sasaran Kegiatan (SK). Sasaran Kegiatan 1 yaitu “Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan” yang terdiri dari 1 Indikator Kinerja:

1. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup BBRP2BKP (unit) dengan target sebesar 1;

Serta, Sasaran Kegiatan 2 yaitu "Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker" yang terdiri dari 10 Indikator Kinerja:

1. Nilai PNBK BBRP2BKP (Rupiah Miliar) dengan target sebesar 0,08;
2. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BBRP2BKP dibandingkan realisasi Anggaran BBRP2BKP TA 2022 (%) dengan target sebesar $\leq 0,5$;
3. Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks) dengan target sebesar 75;
4. Nilai PM SAKIP Lingkup BBRP2BKP (Nilai) dengan target sebesar 80,5;
5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BBRP2BKP (Nilai) dengan target sebesar 92;
6. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRP2BKP (%) dengan target sebesar 92;
7. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BBRP2BKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dengan target sebesar 75;
8. Nilai IKPA BBRP2BKP (Nilai) dengan target sebesar 89;
9. Nilai Kinerja Anggaran BBRP2BKP (Nilai) dengan target sebesar 82;
10. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%) dengan target sebesar 100.

Potensi dan Permasalahan

Potensi yang dimiliki oleh BBRP2BKP yaitu:

- a. Memiliki SDM sebanyak 73 pegawai terdiri dari 48 pegawai (66%) berstatus PNS dan 25 pegawai (34%) berstatus Non PNS. SDM BBRP2BKP memangku berbagai jabatan yaitu Instruktur, Pranata Keuangan APBN, Perencana, Pranata Humas, Pustakawan, Analis Pengelola Keuangan APBN, Arsiparis, Analis Kepegawaian serta Fungsional Umum. Sebagian besar pegawai BBRP2BKP memangku jabatan fungsional Umum (38%) dan memangku jabatan fungsional instruktur (35%).
- b. Tersedianya anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) yang terutang dalam DIPA BBRP2BKP Tahun 2023 untuk pelaksanaan Program/Kegiatan;
- c. Memiliki prasarana berupa tanah serta gedung/bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan manajerial, olah raga serta sarana berupa peralatan dan mesin untuk kegiatan pengujian di Laboratorium;
- d. Terjalannya kerjasama antara BBRP2BKP dengan mitra terkait (perguruan tinggi, dinas kab/kota, dll)

Sedangkan permasalahan yang terjadi pada triwulan III tahun 2023 yaitu belum adanya kepastian transformasi kelembagaan sehingga tugas dan fungsi BBRP2BKP tidak selaras dengan kegiatan yang dilaksanakan dan belum menghasilkan kinerja yang berbasis *outcome*.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi serta sasaran kegiatan BBRP2BKP, pada awal tahun 2023 BBRP2BKP mempunyai alokasi anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM)

sebesar Rp18.750.000.000 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp7.400.000.000, Belanja Barang sebesar Rp11.100.000.000 serta Belanja Modal sebesar Rp250.000.000.

Dari DIPA awal telah dilakukan revisi untuk memenuhi kebutuhan kegiatan sehingga dilakukan pergeseran anggaran antar komponen dengan Nomor: SP-DIPA-031.12.2.403835/2023 Revisi 1 tanggal 16 Februari 2023.

Alokasi anggaran BBRP2BKP tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) program, yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan alokasi anggaran Rp250.000.000, serta Program Dukungan Manajemen dengan alokasi anggaran Rp18.500.000.000.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, pada tahun 2023 telah disusun Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2023 antara Plt. Kepala BBRP2BKP dengan Kepala BRSDMKP. Perjanjian Kinerja tersebut terdiri atas 2 Sasaran Kegiatan (SK) dan 11 Indikator Kinerja (IK), sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BBRP2BKP Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup BBRP2BKP (unit)	1
2		2	Nilai PNPB BBRP2BKP (Rupiah Miliar)	0,08

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	3	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BBRP2BKP dibandingkan realisasi Anggaran BBRP2BKP TA 2022 (%)	≤ 0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)	75
		5	Nilai PM SAKIP Lingkup BBRP2BKP (Nilai)	80,5
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BBRP2BKP (Nilai)	92
		7	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRP2BKP (%)	92
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BBRP2BKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		9	Nilai IKPA BBRP2BKP (Nilai)	89
		10	Nilai Kinerja Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	82
		11	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)	100

Pengukuran Kinerja Tahun 2023

a. Rumusan Pengukuran

Pengukuran Capaian Kinerja BBRP2BKP tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu *maximize*,

minimize, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Status Indeks capaian IK adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Pada tahun 2023, dalam status pengukuran indeks capaian IK terdapat tambahan indeks berwarna biru "Istimewa" dengan keterangan nilai capaian 110 - 120. Selain itu untuk jenis Indikator pada aplikasi kinerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dimana jika Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dikelompokkan dari alokasi anggarannya, yaitu memakai alokasi anggaran Layanan Dukungan Manajerial. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing Indikator Kinerja.

b. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja BBRP2BKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang

bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BBRP2BKP yang ditetapkan melalui Surat Tugas Plt. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Nomor: B.80/BRSDM-BBRPPBKP/TU.210/I/2023 tanggal 6 Januari 2023.

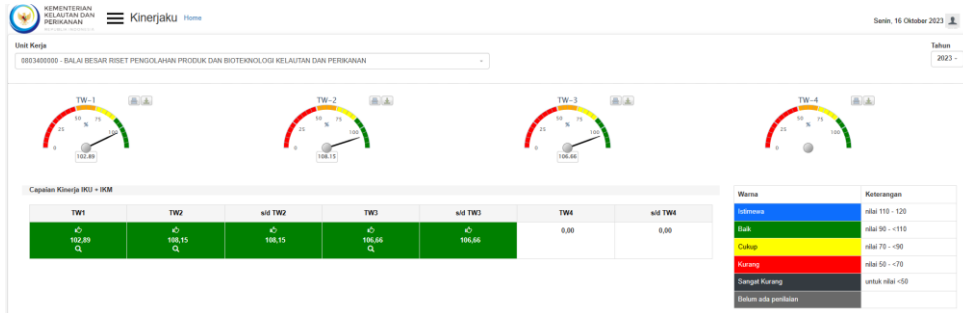
Tim ini bertugas dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) tahun 2023 yang meliputi kegiatan pengukuran dan pelaporan kinerja. Keanggotaan Tim terdiri dari Penanggung Jawab yang bertanggung jawab atas tata kelola kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2023; Ketua yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan atas tata kelola kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2023; dan Anggota yang menyiapkan bahan-bahan dan membantu Ketua dalam penyusunan atas tata kelola kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Prestasi Indikator Kinerja (IK) Triwulan III Tahun 2023

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini BBRP2BKP telah membentuk Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 untuk melaksanakan pengukuran kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap tiga bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh Sasaran Kegiatan (SK) yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di <http://kinerjaku.kkp.go.id> yang dikelola oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan BBRP2BKP dari bulan Januari hingga September yang terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan (SK) dan 11 Indikator Kinerja (IK). Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi dari masing-masing IK yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBRP2BKP Triwulan III tahun 2023 mendapatkan Skor Kinerja sebesar **106,66** dengan status **BAIK**, sebagaimana Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Dashboard Kinerjaku BBRP2KP Triwulan III Tahun 2023

Hingga triwulan III tahun 2023, dari 11 IK yang menjadi target BBRP2BKP hanya 3 IK yang memiliki capaian, sedangkan untuk IK lainnya baru akan diukur pada triwulan berikutnya.

Evaluasi dan Analisis Kinerja






Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan IK yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan/sasaran BBRP2BKP. Capaian Indikator Kinerja (IK) BBRP2BKP pada triwulan III tahun 2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja (IK) Triwulan III Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target/Capaian				Ket
				Target 2023	Target Triwulan III 2023	Capaian Triwulan III 2023	%	
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup BBRP2BKP (unit)	1	-	-	-	
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2	Nilai PNBP BBRP2BKP (Rupiah Miliar)	0,08	-	-	-	
		3	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BBRP2BKP dibandingkan realisasi Anggaran BBRP2BKP TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-	
		4	Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)	75	-	-	-	
		5	Nilai PM SAKIP Lingkup BBRP2BKP (Nilai)	80,5	-	-	-	
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BBRP2BKP (Nilai)	92	-	-	-	
		7	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRP2BKP (%)	92	92	133,33	120	
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BBRP2BKP yang dokumen tindak lanjutnya telah	75	75	75	100	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Capaian				Ket
			Target 2023	Target Triwulan III 2023	Capaian Triwulan III 2023	%	
		dilengkapi dan disampaikan (%)					
		9 Nilai IKPA BBRP2BKP (Nilai)	89	-	-	-	
		10 Nilai Kinerja Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	82	-	-	-	
		11 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)	100	75	75	100	

Warna	Keterangan
	Istimewa (nilai 110 - 120)
	Baik (nilai 90 - <110)
	Cukup (nilai 70 - < 90)
	Kurang (nilai 50 - < 70)
	Sangat Kurang (nilai <50)
	Belum ada penilaian

Berdasarkan Tabel di atas, pada Triwulan III Tahun 2023 diketahui bahwa 3 IK memiliki capaian dengan nilai $\geq 100\%$ (notifikasi berwarna hijau).

Evaluasi dan analisis kinerja menampilkan perbandingan target dan capaian tahun berjalan, kinerja dengan tahun sebelumnya. Berikut analisis keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja di masing-masing Sasaran Kegiatan.

Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan

Sasaran Kegiatan 1 pada aplikasi Kinerjaaku, Indikator Kinerjanya memiliki kode IKU (Indikator Kinerja Utama), karena anggarannya bukan berasal dari Program Dukungan Manajemen, melainkan berasal dari Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan.

Capaian Sasaran Kegiatan (SK) 1 sebesar 0%, yang diukur berdasarkan 1 IKU, yaitu IKU 1: Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup BBRP2BKP (unit).

Indikator Kinerja Utama 1

Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup BBRP2BKP (unit)

Indikator Kinerja "Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup BBRP2BKP (unit)" didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh BBRP2BKP.

IKU 1 pada Triwulan III tahun 2023 belum ada capaian karena IKU ini ditargetkan baru akan tercapai di akhir tahun (Triwulan IV). Pada tahun 2020-2021 terdapat IKU ini dengan target 1 (unit) dan pada tahun 2022, IKU ini tidak dimunculkan karena tidak dicascading dari BRSDMKP. Namun, pada tahun 2023, IKU ini muncul kembali dikarenakan IKU ini dicascading dari BRSDMKP.

Dibandingkan dengan Triwulan III pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, IKU ini tidak dapat dibandingkan, karena IKU ini merupakan IKU baru. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2020-

2021, capaian kinerja IKU ini sama-sama belum terdapat capaian karena baru akan diukur pada triwulan IV.

Capaian IKU ini diperoleh dari jumlah sarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal. Bukti dukung dari capaian IKU ini adalah laporan pengadaan dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Hingga Triwulan III tahun 2023, belum ada progress kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IKU ini, karena anggaran untuk mencapai IKU ini diblokir oleh Kementerian Keuangan RI.

Kegiatan yang mendukung IKU ini adalah kegiatan "Sarana Pengujian Kelayakan Teknologi Kelautan dan Perikanan" dengan pagu Rp250.000.000 (belanja modal) serta realisasi sebesar Rp0 (0%).

Sasaran Kegiatan 2

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Pada Sasaran Kegiatan 2, pada aplikasi Kinerjaaku seluruh Indikator Kinerja memiliki kode IKM (Indikator Kinerja Manajerial), karena anggarannya berasal dari Program Dukungan Manajemen.

Capaian Sasaran Kegiatan (SK) 2 sebesar **106,66**, yang diukur berdasarkan 3 IKM, yaitu IKM 7: Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRP2BKP (%); IKM 8: Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BBRP2BKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%); dan IKM 11: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%).

Indikator Kinerja Manajerial 2

Nilai PNBP BBRP2BKP (Rupiah Miliar)

Indikator Kinerja “Nilai PNBP BBRP2BKP (Rupiah Miliar)” merupakan indikator yang menunjukkan nilai PNBP dari penerimaan BBRP2BKP. Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

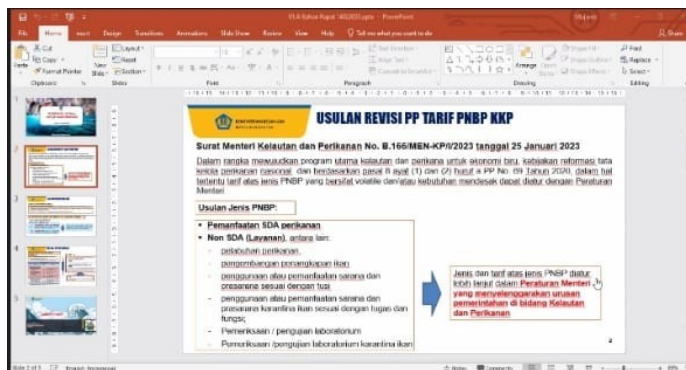
- a) penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b) penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c) penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d) penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e) penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f) penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- g) penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Capaian IKM ini diperoleh dari Nilai PNBP Sektor KP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya. Adapun bukti dukung dari capaian IKM ini adalah data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya/surat penyampaian realisasi PNBP dari Biro Keuangan.

IKM 2 pada Triwulan III tahun 2023 belum ada capaian karena IKM ini ditargetkan baru akan tercapai di akhir tahun (Triwulan IV). IKM ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020-2022, karena IKM ini merupakan IKM baru di tahun 2023.

Adapun progress kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menunjang capaian IKM ini diantaranya:

- Menghadiri Rapat pembahasan usulan perubahan PP No.85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada KKP, *via zoom meeting*; Selasa, 14 Februari 2023.



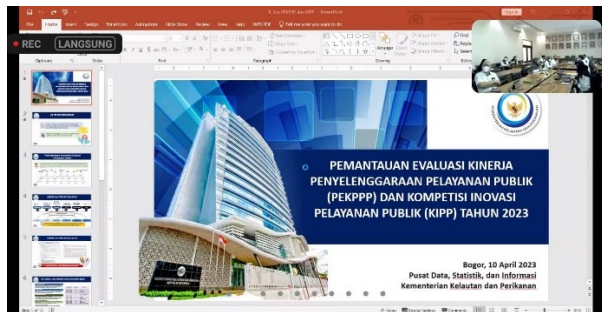
Gambar 4. Rapat pembahasan usulan perubahan PP No.85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada KKP

- Menghadiri rapat koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BRSDM yang diselenggarakan oleh Sekretariat BRSDM di Gedung Mina Bahari III, Gambir; Rabu, 23 Februari 2023.
- Koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan Pelayanan Publik lingkup BRSDM yang diselenggarakan oleh Sekretariat BRSDM di Gedung Mina Bahari III, Gambir; Rabu, 23 Februari 2023.



Gambar 5. Rapat koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BRSDM yang diselenggarakan oleh Sekretariat BRSDM

- Menghadiri Sosialisasi Pelayanan Publik KKP dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KKP terkait Pemantuan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023, *via zoom meeting*; Senin, 10 April 2023.



Gambar 6. Rapat koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BRSDM yang diselenggarakan oleh Sekretariat BRSDM

- Menghadiri rapat Koordinasi Kegiatan Pelayanan Publik lingkup BRSDM, Persiapan Penilaian PEKPPP 2024, Penyusunan Laporan SKM Tahun 2023 yang diselenggarakan BRSDM di Ruang Rapat Sekretariat BRSDM, Gedung Mina Bahari III, Lantai 6; Rabu, 21 Juni 2023.



Gambar 7. Rapat koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BRSDM yang diselenggarakan oleh Sekretariat BRSDM

- Menghadiri Rapat Pembahasan Rencana Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan PT. Mutu Internasional, di PT Mutu Agung Lestari, Depok, Jawa Barat.



Gambar 8. Rapat Pembahasan Rencana Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dengan PT. Mutu Internasional

- Mengirimkan Surat Nomor: B.1753/BRSDM-BBRPPBKP/PL.930/IX/2023 pada tanggal 22 September 2023 kepada Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan perihal Usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa Mini Bus.

Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBRP2BKP bersumber dari pendapatan umum dan fungsional. Target PNBP Tahun 2023 sebesar Rp80.000.000, yang terdiri dari target PNBP

fungsional sebesar Rp55.000.000 dan target PNBPN umum sebesar Rp25.000.000.

Progres capaian IKM ini sampai dengan triwulan III tahun 2023 yaitu penerimaan PNBPN Umum sebesar Rp1.828.512 serta PNBPN fungsional sebesar Rp2.040.000 yang diperoleh dari Unit Pelayanan Jasa pengujian analisa sampel eksternal. Sebanyak 16 (enam belas) sampel eksternal yang masuk melalui Unit Pelayanan Jasa. Keseluruhan sampel tersebut terdistribusi ke Laboratorium Fisik dan Laboratorium Kimia BBRP2BKP. Jumlah pelanggan jasa analisis laboratorium BBRPPBKP hingga bulan Februari tahun 2023 sebanyak 4 (empat) orang pelanggan. Pelanggan jasa analisis Laboratorium BBRPPBKP dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu mahasiswa dari perguruan tinggi dan K/L.

Saat ini kegiatan penerimaan pengujian sampel eksternal tidak dapat dilakukan sejak terbitnya Surat Plh. Sekretaris BRSDM No.1254/BRSDM.1/KU.340/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 perihal layanan uji laboratorium pada Satker eks-Riset BRSDM tidak dapat dipungut PNBPN dikarenakan tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan uji laboratorium, namun dapat melakukan kerjasama pemanfaatan aset laboratorium sesuai PMK 115 tahun 2020 untuk menghasilkan PNBPN.

Kegiatan yang mendukung IKM ini adalah kegiatan “Layanan Umum: Pelayanan Teknis dan Jasa Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu Rp175.000.000 serta realisasi sebesar Rp3.923.500 (2,24%).

Indikator Kinerja Manajerial 3

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BBRP2BKP dibandingkan realisasi Anggaran BBRP2BKP TA 2022 (%)

Indikator Kinerja “Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BBRP2BKP dibandingkan realisasi Anggaran BBRP2BKP TA 2022 (%)” didefinisikan sebagai nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK BBRP2KP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

IKM 3 pada Triwulan III tahun 2023 belum ada capaian karena IKM ini ditargetkan baru akan tercapai di akhir tahun (Triwulan IV). Dibandingkan dengan Triwulan III pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 untuk IKM ini tetap atau sama dengan tidak ada capaian. IKM ini merupakan IKM dengan polarisasi Minimize (semakin rendah semakin baik), yang mengalami kenaikan target dari tahun 2022 sebesar ≤ 1 menjadi $\leq 0,5$ pada tahun 2023.

Capaian IKM ini diperoleh dengan menghitung batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2022 (audited) tidak melebihi atau 0,5 % dari total realisasi anggaran Tahun 2022. Bukti capaian IKM ini berupa Surat dari Sekretariat BRSDMKP perihal capaian IKU Hasil LHP BPK lingkup BRSDMKP.

Progress capaian IKM ini yaitu adanya dilakukannya pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala, dan komitmen dalam melakukan pengendalian internal dan tertib

administrasi keuangan sehingga diharapkan tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan BPK.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKM ini adalah kegiatan manajerial "Layanan Umum: Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan" dengan pagu anggaran Rp66.250.000 dan realisasi sebesar Rp52.240.906 (78,85%).

Indikator Kinerja Manajerial 4

Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

IKM 4 pada Triwulan III tahun 2023 belum ada capaian karena IKM ini ditargetkan baru diukur di akhir tahun (Triwulan IV). Dibandingkan dengan Triwulan III pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 untuk IKM ini tetap atau sama dengan tidak ada capaian.

IKM yang sama juga terdapat pada Satker Balai Besar Sosial dan Ekonomi (BBRSEKP) dengan target 75 pada tahun 2023 dan sama-sama akan diukur di akhir tahun.

Bukti dari capaian IKM ini adalah Surat dari Sekretariat BRSDMKP perihal capaian IKU IP ASN lingkup BRSDMKP dan/atau screenshot aplikasi simpeg Capture dari <http://www.ropeg.kkp.go.id/> --> IP ASN

Progress kegiatan IKM ini berasal dari keikutsertaan pegawai pada kegiatan seminar, pelatihan, workshop dan diklat yang dibuktikan dengan data dukung berupa sertifikat yang diinput ke website eskp.kkp.go.id. Selain itu telah dilakukan koordinasi, verifikasi dan validasi terkait data dukung capaian yang diinput ke masing-masing SKP pegawai.



Gambar 9. Rapat koordinasi terkait verifikasi data dukung capaian SKP Pegawai BBRP2BKP

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKM ini adalah kegiatan Manajerial "Layanan Manajemen SDM: 1) Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan; 2) Pelayanan Jabatan Fungsional Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan" dengan pagu anggaran sebesar Rp95.000.000 serta realisasi sebesar Rp65.922.361 (69,39%).

Indikator Kinerja Manajerial 5

Nilai PM SAKIP Lingkup BBRP2BKP (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi

kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. IKM 5 pada Triwulan III tahun 2023 belum ada capaian karena IKM ini ditargetkan baru akan tercapai di akhir tahun (Triwulan IV). IKM ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena IKM ini merupakan IKM baru di tahun 2023.

Bukti dukung capaian IKM ini adalah Surat dari Sekretariat BRSDMKP perihal nilai PM SAKIP lingkup BRSDMKP. Adapun progress capaian IKM ini yaitu telah dilakukan penilaian mandiri dan verifikasi bukti dukung SAKIP BBRP2BKP pada tanggal 10-12 Mei 2023 di BRPBATPP Sempur Bogor, yang mencakup:

1. Pemenuhan dokumen SAKIP meliputi dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2. Pengisian hasil penilaian mandiri SAKIP pada aplikasi DSMS BRSDM.



Gambar 10. Penilaian mandiri SAKIP lingkup BRSDMKP tahun 2023

Verifikasi ini dilakukan dengan berpedoman pada Permen KP Nomor 68 Tahun 2017 dan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021. Setelah melaksanakan verifikasi tersebut, BBRP2BKP mendapatkan nilai atas penilaian mandiri SAKIP lingkup BRSDM sebesar 81,20 dengan predikat A (memuaskan). Namun, setelah dilakukan perbaikan pada Laporan Kinerja (LKj) BBRP2BKP Tahun 2022 dan berdasarkan Surat Sekretaris BRSDMKP Nomor: B. 3913/BRSDM.1/RC.510/VII/2023 pada tanggal 14 Juli 2023 perihal Perbaikan Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level 2 Balai Besar lingkup BRSDM, disampaikan perubahan nilai mandiri SAKIP BBRP2BKP tahun 2023 menjadi **81,60** dengan predikat A. Nilai tersebut telah melebihi target tahunan BBRP2BKP yaitu 80,5.

Kegiatan yang mendukung capaian pada IKM ini adalah kegiatan manajerial “Layanan Pemantauan dan Evaluasi: Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp110.000.000 serta realisasi sebesar Rp35.372.662 (32,16%).

Indikator Kinerja Manajerial 6

Nilai Rekonsiliasi Kinerja BBRP2BKP (Nilai)

Indikator Kinerja “Nilai Rekonsiliasi Kinerja BBRP2BKP (Nilai)” didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK.

IKM 6 pada Triwulan III tahun 2023 belum ada capaian karena IKM ini ditargetkan baru akan tercapai di Triwulan IV. Dibandingkan dengan Triwulan III pada tahun sebelumnya, yaitu

tahun 2022 untuk IKM ini tetap atau sama dengan tidak ada capaian.

Pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun melalui kegiatan rekonsiliasi kinerja yaitu dengan menghitung capaian pada 4 aspek yaitu aspek kepatuhan, aspek kesesuaian, aspek ketercapaian dan aspek ketepatan. Bukti dari capaian IKM ini adalah Surat dari Sekretariat BRSDMKP perihal capaian IKU Rekonsiliasi Kinerja lingkup BRSDMKP.

Progress kegiatan yang telah dilakukan hingga Triwulan II tahun 2023 yaitu melakukan penyelarasan dokumen perencanaan mulai dari Perjanjian Kinerja (PK), Manual IK, Rencana Aksi, Rincian Target IK, serta telah dilakukan validasi capaian kinerja pada aplikasi Kinerjaku. Selain itu, pada tanggal 29 September 2023 telah dilaksanakan kegiatan *assessment* awal IKU Rekonsiliasi Kinerja pada BBRP2BKP.



Gambar 11. Kegiatan *assessment* awal IKU Rekonsiliasi Kinerja pada BBRP2BKP

Hasil *assessment* memperlihatkan bahwa capaian nilai IKU Rekonsiliasi Kinerja BBRP2BKP telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 92. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, hasil verifikasi masih

dibawah capaian tahun 2022. Rincian hasil *assessment* sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Nilai IKU Rekonsiliasi Kinerja tahun 2022 dengan Nilai Assesment Awal IKU Rekonsiliasi Kinerja Tahun 2023

Satuan Kerja	Nilai IKU Rekonsiliasi Kinerja Tahun 2022	Nilai Assesment Awal IKU Rekonsiliasi Kinerja Tahun 2023	
		Verifikasi Awal	Setelah Perbaikan Dokumen
BBRP2BKP	98,05		
		93,82	96,38

Adapun kegiatan yang mendukung capaian pada IKM ini adalah kegiatan manajerial “Layanan Perencanaan dan Penganggaran: Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran sebesar Rp190.000.000 serta realisasi sebesar Rp79.646.107 (41,92%).

Indikator Kinerja Manajerial 7

Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRP2BKP (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu: (i) Sharing dokumen, (bobot 20%) (ii) keikutsertaan pejabat dan staf (bobot 10%), (iii) keaktifan dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%).

Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor:2659/SJ.7/TU.210/IX/2023 tanggal 4 September 2023, pelaksanaan Manajemen Pengetahuan telah diintegrasikan pada Portal Collaboration Office di laman <https://portal.kkp.go.id> yang pada triwulan-triwulan sebelumnya dilakukan pada website kinerjakkp.bitrix24.com. Perubahan penilaian Manajemen Pengetahuan ini telah di sosialisasikan oleh Tim Sekretariat BPPSDMKP pada tanggal 5 September 2023.



Gambar 12. Menerima kunjungan kerja Tim Sekretariat BPPSDM KP dalam rangka Sosialisasi IKU Manajemen Pengetahuan KKP

Pejabat yang dinilai keaktifannya dalam penilaian Manajemen Pengetahuan adalah pejabat setingkat eselon 2. Adapun perubahan pada penilaian komponen Manajemen Pengetahuan adalah sebagaimana berikut:

Tabel 5. Perubahan Penilaian Komponen Manajemen Pengetahuan

Sebelum	Sesudah
Komponen penilaian: dokumen (20%) dan keaktifan (80%)	Verifikasi Awal Setelah Perbaikan Dokumen
Aplikasi Bitrix24	Aplikasi Collaboration Office
Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 3	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4

Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2, Koordinator, dan Subkoordinator lingkup Pusat	Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2 dan Ketua Tim Kerja
---	--

Capaian IKM 7 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian IKM 7

IKM 7. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRP2BKP (%)									
Realisasi TW III			2023					Renstra BBRP2BKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020-2022			Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022	92	92	133,3	120	33,30	90	148,11

Capaian IKM 7 pada triwulan III tahun 2023 sebesar 133,33 (120%) melebihi dari target yang telah ditetapkan (92). Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan III tahun 2022, terdapat peningkatan target dari 86% menjadi 92%, dan terdapat peningkatan persentase capaian dari tahun 2022 yaitu 116,28% menjadi 120% pada tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (90%), maka capaian pada tahun 2023 sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

IKM yang sama juga terdapat pada Satker Balai Besar Sosial dan Ekonomi (BBRSEKP) dengan target yang sama dengan BBRP2BKP yaitu 92 dan capaian yang sama yaitu 133,33 dengan persentase capaian sebesar 120%.

Bukti capaian IKM ini yaitu Surat dari Sekretaris BRSDMKP Nomor B.6388/BRSDM.1/RC.610/X/2023 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Triwulan III Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023.

Faktor pendukung tercapainya IKM ini diantaranya:

- Peran serta aktif pejabat eselon 2 dan Ketua Tim Kerja BBRP2BKP dalam melakukan posting konten berita hasil kegiatan pada aplikasi *Collaboration Office*.
- Pendaftaran keikutsertaan pegawai ke dalam aplikasi *Collaboration Office* melalui koordinasi dengan Kelompok Data BPPSDM KP.
- Internalisasi melalui kegiatan sosialisasi metode penilaian Sistem Manajemen Pengetahuan dari Pusdatin KKP kepada masing-masing penanggungjawab.
- Koordinasi yang baik antara Tim/penanggungjawab IKM MP dilingkup BBRP2BKP dengan Tim di Sekretariat BRSDMKP serta Setjen KKP.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKM ini adalah kegiatan manajerial "Layanan Data dan Informasi: Pelayanan Data Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan/ 1) Pelayanan Data; 2) Pelayanan Informasi Publik" dengan pagu anggaran sebesar Rp140.000.000 serta realisasi sebesar Rp57.247.976 (40,89%).

Indikator Kinerja Manajerial 8

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BBRP2BKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Indikator Kinerja "Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BBRP2BKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah

ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP.

Capaian IKM 8 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian IKM 8

IKM 8. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BBRP2BKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)									
Realisasi TW III			2023					Renstra BBRP2BKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020-2022			Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
2020	2021	2022	75	75	75	100	0	80	93,75

Capaian IKM 8 pada Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebesar 75% (100%), sama dari target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat kenaikan target dari 70 menjadi 75 di tahun 2023, sedangkan untuk capaian mengalami penurunan dari 100 (120%) pada tahun 2022, menjadi 75 (100%) pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan hingga triwulan III tahun 2023 ini BBRP2BKP tidak diuji petik oleh Inspektorat Jenderal, sehingga sesuai arahan dari Biro Perencanaan yaitu bagi Satker yang tidak diuji petik Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal, maka nilai capaian Satker yang diperoleh maksimal sebesar 75 (sesuai target) dengan persentase capaian sebesar 100%.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu sebesar 80, maka persentase capaian pada tahun 2023 sudah mencapai 93,75%.

IKM yang sama juga terdapat pada Satker Balai Besar Sosial dan Ekonomi (BBRSEKP) dengan target yang sama dengan BBRP2BKP yaitu 75 dan BBRSEKP memiliki capaian yang sama

dengan BBRP2BKP yaitu sebesar 75 dengan persentase capaian 100%, karena BBRSEKP juga tidak diuji petik hingga triwulan III tahun 2023.

Bukti capaian IKM ini diperoleh dari Surat Sekretaris BRSDMKP Nomor: B.6509/BRSDM.1/HP.520/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”.

Faktor yang mendukung tercapainya IKM ini dikarenakan adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran secara akuntabilitas untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam administrasi maupun substansinya.

Kegiatan yang mendukung capaian pada IKM ini adalah kegiatan manajerial “Layanan Umum: Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara” dengan pagu anggaran sebesar Rp26.500.000 serta realisasi sebesar Rp23.663.788 (89,30%).

Indikator Kinerja Manajerial 9

Nilai IKPA BBRP2BKP (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap perencanaan efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi dengan memperhitungkan 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Capaian IKM 9 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 tidak ada capaian, karena IKM ini baru akan diukur capaiannya di triwulan IV. Jika dibandingkan dengan Triwulan III pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, IKM ini sama-sama tidak memiliki capaian. Bukti dukung capaian IKM ini adalah Nota Dinas Dari Biro Keuangan perihal capaian IKU IKPA lingkup KKP dan/atau screenshot aplikasi OM SPAN

Progress capaian IKM ini yaitu telah melakukan penyesuaian kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang diukur dengan 8 indikator kinerja anggaran. Selain itu telah dilakukan pemantauan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala, penerapan sistem akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta penginputan capaian output di setiap awal bulan pada aplikasi SAKTI.

Kegiatan yang mendukung capaian pada IKM ini adalah kegiatan manajerial "Layanan Umum: Pelayanan Keuangan" dengan pagu anggaran sebesar Rp82.250.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp77.336.790 (94,03%).

Indikator Kinerja Manajerial 10

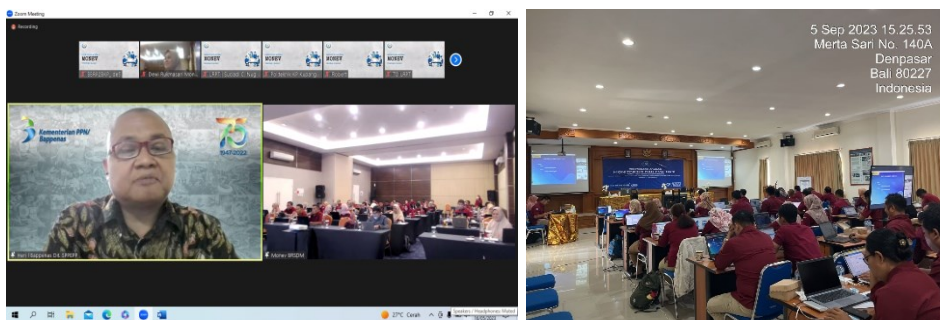
Nilai Kinerja Anggaran BBRP2BKP (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain
 - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
 - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
 - d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
 - e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

IKM 10 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 tidak ada capaian karena periode pengukuran dilakukan pada triwulan IV. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada triwulan III tahun 2022, IKM ini sama-sama belum memiliki capaian. Bukti capaian IKM ini diperoleh dari Nota Dinas Dari Biro Keuangan perihal capaian IKU NKA lingkup KKP dan/atau *screenshot* aplikasi Smart DJA.

Progres yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian IKM ini diantaranya adalah melakukan penyerapan anggaran yang konsisten dengan DIPA, dan melakukan penginputan capaian output di setiap awal bulan pada aplikasi SAKTI yang akan otomatis terinput ke dalam aplikasi SMART DJA. Selain itu juga telah dilakukan rekonsiliasi aplikasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi lingkup BRSDM Triwulan I 2023 pada tanggal 15-17 Mei 2023 di Favehotel Padjajaran Bogor dan Triwulan II 2023 pada tanggal 5-7 September di Loka Riset Perikanan Tuna, Bali.



Gambar 13. Rekonsiliasi aplikasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi lingkup BRSDM

Kegiatan yang mendukung capaian pada IKM ini adalah kegiatan manajerial “Layanan Pemantauan dan Evaluasi: Pelayanan Pelaporan Kinerja Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp45.000.000 serta realisasi sebesar Rp7.607.091 (16,90%).

Indikator Kinerja Manajerial 11

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)

Kegiatan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Program Dukungan Manajemen BBRP2BKP terdiri dari:

1. Layanan Hubungan Masyarakat
2. Layanan Umum
3. Layanan Data dan Informasi
4. Layanan Perkantoran
5. Layanan Manajemen SDM
6. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
7. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Capaian IKM 11 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian IKM 11

IKM 11. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)									
Realisasi TW III			2023					Renstra BBRP2BKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020-2022									
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022- 2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	75	75	100	75	75	100	0	100	100

Capaian kinerja IKM 11 pada triwulan III tahun 2023 sebesar 75% atau sebanyak 9 dokumen sesuai target yang ditetapkan (75%) dengan persentase capaian 100%. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, target dan capaian IKM ini tidak ada perubahan. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu

sebesar 100%, maka capaian pada tahun 2023 sudah sesuai dengan target jangka menengah.

Adapun bukti capaian IKM ini diperoleh dari dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker berupa Laporan Bulanan BBRP2BKP bulan Januari-September Tahun 2023 sebanyak 9 dokumen.



Gambar 14. Laporan Bulanan BBRP2BKP Bulan Januari-September Tahun 2023

Faktor yang menyebabkan tercapainya IKM ini adalah adanya komitmen yang tinggi dari Plt. Kepala BBRP2BKP untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta koordinasi yang intensif dengan penanggungjawab IKM untuk menyajikan bukti dukung berupa Laporan Bulanan BBRP2BKP secara rutin dari kegiatan layanan dukungan manajemen internal.

Kegiatan yang mendukung capaian IKM ini adalah kegiatan layanan dukungan manajemen internal meliputi “Layanan Perkantoran: 1) Gaji dan Tunjangan, 2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor serta Layanan Hubungan Masyarakat” dengan pagu anggaran sebesar Rp17.570.000.000 serta realisasi sebesar Rp12.008.890.356 (68,35%).

Akuntabilitas Keuangan BBRP2BKP Triwulan III Tahun 2023

Realisasi anggaran BBRP2BKP sampai dengan akhir triwulan III tahun 2023 sebesar Rp12.411.851.537(66,20%). Realisasi anggaran per jenis belanja disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Realisasi Anggaran BBRP2BKP Triwulan III Tahun 2023

No	Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	7.400.000.000	5.123.570.923	69,24
2	Belanja Barang	11.100.000.000	7.288.280.614	65,66
3	Belanja Modal	250.000.000	0	0
Jumlah		18.750.000.000	12.411.851.537	66,20

Anggaran BBRP2BKP bersumber dari Rupiah Murni (RM) yang terdiri dari 3 (tiga) jenis Belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Hingga akhir triwulan III tahun 2023, realisasi anggaran BBRP2BKP sebesar Rp12.411.851.537(66,20%). Realisasi ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp5.123.570.923 (69,24%) dan belanja barang sebesar Rp7.288.280.614 (65,66%).

Belanja modal belum direalisasikan sama sekali, karena anggarannya diblokir oleh Kementerian Keuangan. Anggaran pada belanja pegawai digunakan untuk keperluan belanja pegawai yaitu untuk membiayai pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BBRP2BKP, serta belanja barang digunakan untuk membiayai dukungan layanan manajemen BBRP2BKP.

Realisasi anggaran pada 2 Sasaran Kegiatan yaitu Sasaran Kegiatan “Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan” dengan alokasi anggaran pada belanja modal sebesar Rp250.000.000 yang belum direalisasikan karena terblokir otomatis oleh Kementerian Keuangan, serta Sasaran Kegiatan “Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker”, dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.500.000.000 yang telah direalisasikan sebesar Rp12.411.851.537(66,20%).

Selanjutnya, realisasi anggaran per-Indikator Kinerja BBRP2BKP Triwulan III tahun 2023 disajikan dalam bentuk Tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Realisasi Anggaran per-Indikator Kinerja BBRP2BKP Triwulan III Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup BBRP2BKP (unit)	250.000.000	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2	Nilai PNPB BBRP2BKP (Rupiah Miliar)	175.000.000	3.923.500	2,24
		3	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BBRP2BKP dibandingkan realisasi Anggaran BBRP2BKP TA 2022 (%)	66.250.000	52.240.906	78,85
		4	Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)	95.000.000	65.922.361	69,39
		5	Nilai PM SAKIP Lingkup BBRP2BKP (Nilai)	110.000.000	35.372.662	32,16
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BBRP2BKP (Nilai)	190.000.000	79.646.107	41,92
		7	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRP2BKP (%)	140.000.000	57.247.976	40,89
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BBRP2BKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	26.500.000	23.663.788	89,30
		9	Nilai IKPA BBRP2BKP (Nilai)	82.250.000	77.336.790	94,03
		10	Nilai Kinerja Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	45.000.000	7.607.091	16,90
		11	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)	17.570.000.000	12.008.890.356	68,35

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Total			18.750.000.000	12.411.851.537	66,20

Upaya pencapaian kinerja BBRP2BKP pada triwulan III tahun 2023 telah dilakukan semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Efisiensi Anggaran dan/atau Alokasi Sumber Daya BBRP2BKP Tahun 2023

- **Analisis Efisiensi Anggaran**

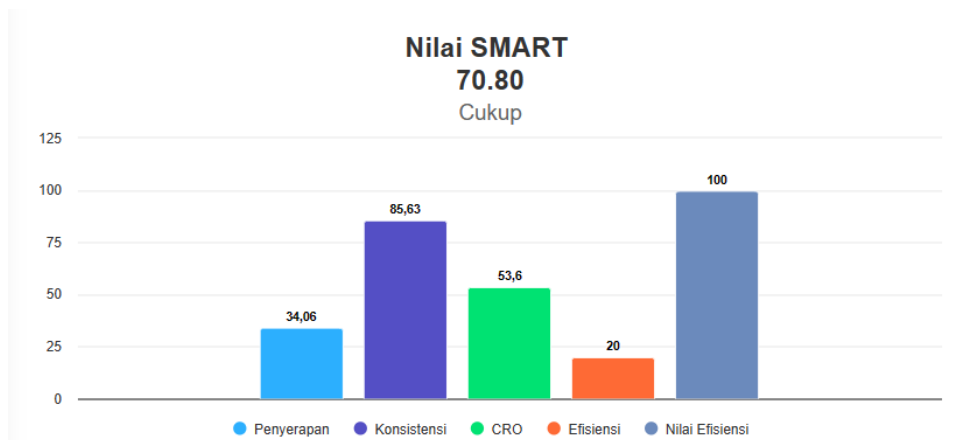
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/ kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (*output*) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (*output*) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan

kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi, yaitu data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA.

Tabel 11. Perhitungan Efisiensi Anggaran BBRP2BKP 2023

Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
34,06	85,63	53,60	20	100	70,80



Gambar 15. Nilai SMART DJA Triwulan III 2023

Berdasarkan tabel di atas, efisiensi anggaran BBRP2BKP memperoleh skor 20 sedangkan nilai efisiensinya sebesar 100. Efisiensi menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai dengan -20, sedangkan nilai efisiensi diperoleh dari transformasi skala efisiensi. Kondisi efisiensi dipengaruhi atas penggunaan

anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 34,06 dengan capaian tingkat output kegiatan sebesar 53,60. Terdapat beberapa *output* dengan capaian diatas atau sama dengan 100%, yaitu:

1. IK 7 "Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRP2BKP (%)", dengan target 92 dan tercapai 133,33 dengan persentase capaian sebesar 120%.
2. IK 8 "Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BBRP2BKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)", dengan target 75 dan tercapai 75 dengan persentase capaian sebesar 100%.
3. IK 11 "Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)", dengan target 75 dan tercapai 75 dengan presentase capaian sebesar 100%.

- **Analisis Alokasi Sumber Daya Manusia**

Secara keseluruhan, jumlah pegawai BBRP2BKP pada triwulan III tahun 2023 yaitu sebanyak 73 pegawai terdiri dari 48 pegawai (66%) berstatus PNS dan 25 pegawai (34%) berstatus Non PNS, pasca pengalihan pegawai BBRP2BKP (peneliti dan teknisi) ke Badan Riset Nasional sesuai dengan Perpres 78 Tahun 2021, perpindahan 1 (satu) orang pegawai yaitu Kartika Winta Apriliany, M.Dev.Pract (Kepala Subbagian Umum BBRP2BKP) yang telah diangkat menjadi Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, serta penambahan 1 (satu) orang pegawai yaitu Dahnil Yufri, S.St.Pi (Instruktur Ahli Pertama SUPM Pariaman) yang diangkat menjadi Analis SDM Aparatur di BBRP2BKP. Diharapkan seluruh kegiatan tetap

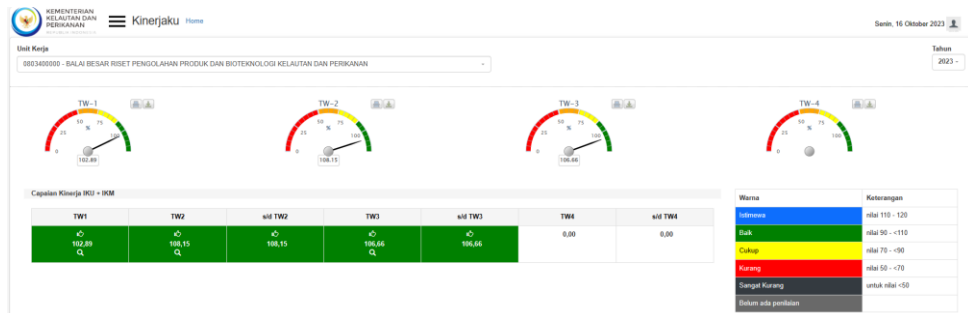
dapat berjalan secara optimal dengan SDM yang ada sehingga target kinerja dapat tercapai.

IV. PENUTUP

Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2023, BBRP2BKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Kegiatan dan 11 Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja BBRP2BKP tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan capaian kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Hasil pengukuran kinerja Triwulan III tahun 2023, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan Skor Kinerja sebesar **106,66 (BAIK)** sebagaimana dashboard Kinerjaku berikut:



Gambar 16. Dashboard Kinerjaku BBRP2BKP Triwulan III Tahun 2022

Hingga triwulan III tahun 2023, dari 11 IK yang menjadi target BBRP2BKP hanya 3 IK yang memiliki capaian, sedangkan untuk IK lainnya baru akan diukur pada triwulan IV. Rincian target dan capaian IK triwulan III tahun 2023 tersebut adalah:

1. IK 7 “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRP2BKP (%)”, dengan target 92 dan tercapai 133,33 dengan persentase capaian sebesar 120%.

2. IK 8 "Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BBRP2BKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)", dengan target 75 dan tercapai 75 dengan persentase capaian sebesar 100%.
3. IK 11 "Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)", dengan target 75 dan tercapai 75 dengan presentase capaian sebesar 100%.

Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum target-target kinerja yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2023 sudah tercapai dan pada kategori baik. Namun demikian, masih perlu pengawalan terhadap Indikator Kinerja yang memiliki target tahunan dalam rangka peningkatan kinerja, guna memastikan bahwa capaian Indikator Kinerja dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja BBRP2BKP pada triwulan berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BBRP2BKP (9 Januari 2023)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Langgeng Nurdiansah**

Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar Riset
Pengolahan Produk dan Bioteknologi
Kelautan dan Perikanan


Langgeng Nurdiansah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup BBRP2BKP (unit)	1
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2 Nilai PNBP BBRP2BKP (Rupiah Miliar)	0,08
		3 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BBRP2BKP dibandingkan realisasi Anggaran BBRP2BKP TA 2022 (%)	≤ 0,5
		4 Indeks Profesionalitas ASN BBRP2BKP (Indeks)	75
		5 Nilai PM SAKIP BBRP2BKP (Nilai)	80,5
		6 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BBRP2BKP (Nilai)	92
		7 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRP2BKP (%)	92
		8 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BBRP2BKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		9 Nilai IKPA BBRP2BKP (Nilai)	89
		10 Nilai Kinerja Anggaran BBRP2BKP (Nilai)	82
		11 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BBRP2BKP (%)	100

Data Anggaran

Program	Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	: Rp18.500.000.000
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	: Rp250.000.000
Total Anggaran BBRP2BKP Tahun 2023		: Rp18.750.000.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta



Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar Riset
Pengolahan Produk dan Bioteknologi
Kelautan dan Perikanan

Langgeng Nurdiansah



Lampiran 2. Surat Tugas tentang Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BBRP2BKP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK
DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. KS. Tubun Petamburan VI, Jakarta 10260
Telp.: (021) 53650157, 53650158 fax.: (021) 53650158
Laman: www.bbrp2b.balibang.kkp.go.id Pos Elektronik: pproduk.biotech@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: B. 80 /BRSDM-BBRPPBKP/TJ.210/I/2023

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, perlu membentuk tim teknis tata kelola kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, perlu ditetapkan Surat Tugas tentang Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan;
- Dasar** :
1. Daftar Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan.
 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Nomor: SP DIPA - 032.12.2.403835/2023 tanggal 30 November 2022.

Memberi Tugas

- Kepada : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran sebagai Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BBRP2BKP Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Surat Tugas ini.
- Untuk : Melaksanakan Uraian tugas terkait kegiatan yang terlampir;

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

Jakarta, 6 Januari 2023
Plt. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan
Produk dan Bioteknologi Kelautan
dan Perikanan
Langgeng Nurdiansah



Lampiran 1
Tanggal : 6 Januari 2023
Nomor : B.39/BRSDM-BBRPPBKP/TU.210/1/2023

**TIM TEKNIS TATA KELOLA KINERJA
BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023**

I. Uraian Tugas

Melaksanakan kegiatan pengelolaan kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) tahun 2023 yang meliputi kegiatan pengukuran dan pelaporan kinerja. Masa kerja Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BBRP2BKP terhitung mulai sejak Surat Tugas ini dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada Anggaran Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023.

II. Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota Tim Tata Kelola Kinerja

Penanggung Jawab, bertanggung jawab atas tata kelola kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Ketua, memimpin dan mengkoordinasikan atas tata kelola kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Anggota, menyiapkan bahan-bahan dan membantu Ketua dalam penyusunan atas tata kelola kinerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Langgeng Nurdiansah, S.P. M.Si Plt. Kepala BBRP2BKP	Penanggung Jawab
2	Kartika Winta Apriany, SIP., M.Dev.Pract Kepala Subbagian Umum	Ketua
3	Bagus Hendrajana, M.Sc Pranata Humas Madya	Anggota
4	Cica Sugiarti, MM Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya	Anggota
5	Zifia Nora, M.Si Perencana Ahli Muda	Anggota
6	Dimas Gondomarto Kusuma, SE, M.AP Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
7	Riezky Darmawan Bayu Wijaya, S. IAN Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	Anggota
8	Indri Hastuti Sulistianingtyas, S.Pi Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
9	Delima Agustina, S.St.Pi Pelaksana	Anggota
10	Muthia Khelfa, S.Si Pelaksana	Anggota
11	Vandra Anggrawan, S.H Pelaksana	Anggota
12	Syamsul Arifin Pelaksana	Anggota

Jakarta, 6 Januari 2023
Plt. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan
Produk dan Bioteknologi Kelautan
dan Perikanan

Langgeng Nurdiansah



BBRP2BKP

Jl. Ks. Tubun Petamburan VI, Jakarta Pusat

Telp. +62 (021) 53650157

Fax. +62 (021) 53650158